

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi bagian timur Indonesia yang terletak di bagian utara pulau Sulawesi dengan luas wilayah sebesar 13.892,47 km². Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang sangat potensial dilihat dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan jumlah penduduk sebanyak 2.660.415 jiwa (sesuai data kabupaten/kota provinsi Sulawesi utara).

Adapun dari segi potensi sumber daya alamnya Sulawesi utara terkenal dengan kekhasan dan kekayaan alamnya yang indah dan subur. Potensi-potensi tersebut di kelola oleh pemerintah hingga menjadi sector penting dalam perekonomian di Sulawesi utara. Potensi tersebut meliputi sector industry yang diantaranya adalah, PT Bimoli: Pabrik minyak kelapa di bitung dan kilang Gas Alam di Tomohon. Sector pertambangan diantaranya adalah, Emas di Tatelu Minahasa Utara, Tompaso Baru Minahasa Selatan dan Belang Minahasa Tenggara; Lapango Mas di Sangihe dan Emas di likupang toka tindung proyek mining minahasa utara. Sector Pariwisata beberapa diantaranya adalah; Taman Nasional Bunaken; pulau Ligaha dll.

Sumber daya ini tersebar di Provinsi Sulawesi Utara sehingga diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah dalam bentuk penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Marzuki et al., (2022) menyatakan bahwa Sumber-sumber penerimaan daerah diharapkan mampu

mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, khususnya melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

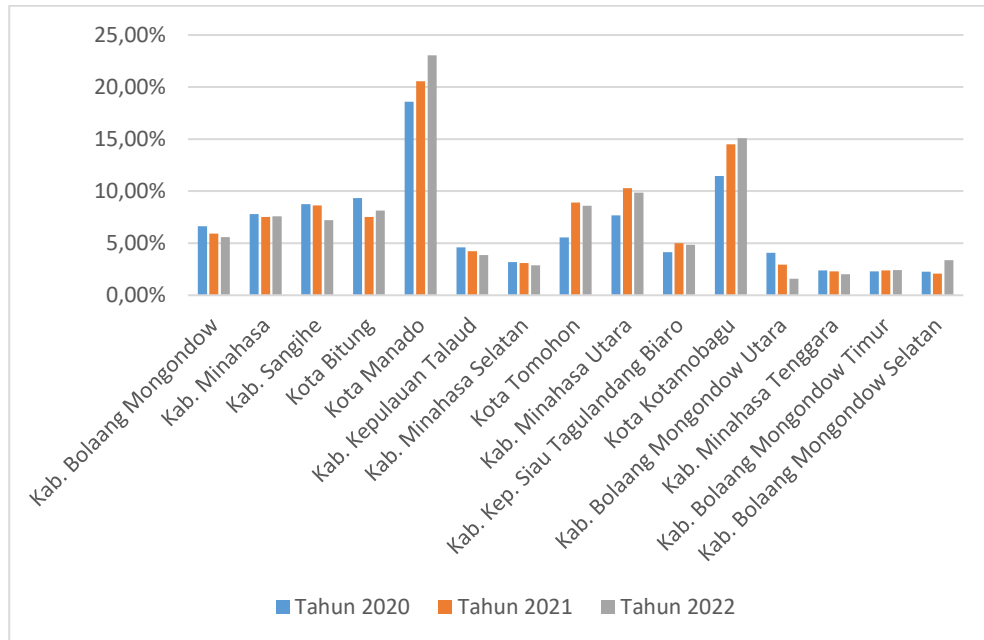
Undang-undang tentang pemerintah daerah no 23 tahun 2014 memberikan kewenangan penuh (otonomi) kepada daerah untuk mengurus dan mengatur keuangannya sendiri sesuai atas dasar kepentingan, kebutuhan, keadilan dan kapitas daerah dengan ketentuan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena nya, otonomi daerah menjadi perwujudan dalam pelaksanaan system desentralisasi di Indonesia, yang dimana pemerintah diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan sehingga menjadi potensi untuk dijadikan sumber-sumber PAD sehingga daerah otonom lebih mandiri dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya (Fauziah & Haryanto, 2019)

Gambaran kemandirian keuangan daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah mampu membangun daerahnya. Menurut (Saleh, 2020) Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditunjukkan oleh kemampuan keuangan daerahnya yang dilihat dari besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2022, Provinsi Sulawesi Utara termasuk Provinsi yang tingkat Kapasitas Fiskal Daerah berada di kategori “Sangat Rendah”. hal tersebut dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerahnya.

Berikut data Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Provinsi

Sulawesi Utara:



Sumber: telah diolah

Gambar 1.1 **Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten/Kota** **Provinsi Sulawesi Utara 2020-2021**

Berdasarkan Gambar 1.1 Menunjukkan bahwa Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara masih jauh dari yang diharapkan. Dari 15 pemerintah daerah hanya dua wilayah yang dapat dikatakan unggul dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu kota manado dengan rasio berada antara 20-25% dan posisi kedua nya adalah kota mobagu yang berada antara 10-15%. Sementara daerah lainnya Rata-rata masih berada dibawah 10%. Nilai kemandirian daerah untuk periode 2020-2022 semuanya masih berada di bawah 25% yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian di Sulawesi utara masih tergolong rendah sekali (Halim, 2007). hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah masih

memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Adapun factor yang turut menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah adalah Pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah Kontribusi PAD pada kabupaten/kota sangat berperan penting dalam meningkatkan kemandirian pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sendiri merancang sistem pemerintahan dengan menekankan peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan dan penyelenggaraan urusan daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah (Kusuma, 2020).

Berdasarkan perkembangan nilai pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa terjadi penurunan hingga tahun 2020 sebesar 2.054,56 miliar. Namun sampai tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan sebesar 2.511,30 miliar. Dari pemaparan data diatas, Pendapatan Asli daerah kabupaten/kota Sulawesi utara mengalami fluktuasi.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 69 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). Dana perimbangan memiliki peran yang penting untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun apabila

tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan lebih dominan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat yang kemudian membuat kemandirian keuangan suatu daerah menurun.

Berdasarkan perkembangan nilai dana perimbangan menunjukkan bahwa dana perimbangan menurun hingga Rp. 13.283,42 miliar. Tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp. 13,649,49 miliar. Kemudian pada tahun 2022 kembali menurun sebesar Rp. 13.102,23 miliar. Dari pemaparan data diatas, dana perimbangan kabupaten/kota provinsi Sulawesi utara mengalami fluktuasi yang diduga karena kebutuhan setiap tahun daerah berbeda-beda.

Pembiayaan anggaran merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan anggaran merupakan bagian penting dari siklus anggaran yang berperan dalam menutupi defisit anggaran dan mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah. Hubungan pembiayaan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, pembiayaan daerah diharapkan dapat memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi negara (Mahdalena, 2023)

Berdasarkan perkembangan nilai pembiayaan meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.719,58 miliar. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.302,89 miliar. Kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.159,92 miliar. Dari pemaparan diatas, dana perimbangan kabupaten/kota provinsi Sulawesi utara mengalami fluktuasi.

Hasil penelitian-peneitian terdahulu terkait dengan kemandirian keuangan

daerah telah banyak dilakukan beberapa diantaranya memperoleh hasil yang cukup beragam. Hasil penelitian (Deisy Debora et al, 2023) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer ke daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten kota di provinsi Sulawesi Utara, dimana hasil penelitiannya menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh dengan hubungan positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana transfer berpengaruh dengan hubungan negative terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sejalan dengan (Saleh, 2020) yaitu Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif, sedangkan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017. Dan secara simultan mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama dengan demikian artinya semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan sedikitnya Dana Perimbangan maka akan meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 2012-2017.

Penelitian Dana Perimbangan yang dilakukan oleh (Nasution et al., 2018) Transfer pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Machfud et al., 2021) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi Dana perimbangan pada suatu daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin rendah.

Hal lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pembiayaan (Mahdalena, 2023). Dalam jangka pendek, pembiayaan daerah tidak terdeteksi. Dalam jangka panjang, pembiayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya apabila, dalam jangka panjang pembiayaan daerah meningkat maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian (Sahrul Ihsan, 2021) dana pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena dan riset diatas, ditemukan masih terdapat perbedaan hasil dari setiap penelitian yang dilakukan, maka inilah salah satu alasan peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pembiayaan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara ?
3. Apakah Pembiayaan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara ?
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara ?
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan menambah wawasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pembiayaan terhadap kemandirian keuangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat bagi kegiatan akademik bagi penelitian sendiri dan bagi pihak fakultas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pembiayaan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap

pengetahuan yang telah didapat mengenai akuntansi keuangan khususnya dalam bidang kemandirian keuangan daerah, dengan cara menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pembiayaan.

